



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN  
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA  
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencairan Dana dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. PT. Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
9. Disposisi adalah pejabat memuat suatu surat dinas yang langsung dituliskan pada lembar khusus terkait permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Daerah atau badan hukum lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai dasar pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk melakukan pencairan dana dalam Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yang dilaksanakan dengan prinsip efektif, dan efisien.

### BAB II PENGANGGARAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### BAB III PENGAJUAN DAN PENCAIRAN

#### Bagian Kesatu Pengajuan

##### Pasal 4

- (1) Direksi PT. Jamkrida Bali Mandara mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:
  - a. kwitansi penerima dana;
  - b. rekening PT. Jamkrida Bali Mandara; dan
  - c. fotokopi kartu tanda penduduk Direktur PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (3) Walikota memberikan rekomendasi/disposisi dan surat pernyataan kepada Kepala Badan untuk menindaklanjuti permohonan pencairan dana Penyertaan Modal.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. ketersediaan dana setoran modal;
  - b. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
  - c. tidak berasal dari dana untuk tujuan pencucian uang.

#### Bagian Kedua Pencairan

##### Pasal 5

Berdasarkan kelengkapan persyaratan, rekomendasi/disposisi dan surat pernyataan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan selaku BUD melaksanakan proses administrasi Penyertaan Modal dengan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM untuk mencairkan dana Penyertaan Modal.

### BAB IV PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengawasan pencairan dana Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Oktober 2023

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar,



**Komang Lestari Kusuma Dewi, SH.,MH.**

NIP. 19750917 199903 2 008